



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/AKRED/S1/XII/2014

**Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial oleh
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Parasian Manurung

2013310007

Bandung

2018



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN-PT No: 468/SK/BAN-PT/AKRED/S1/XII/2014

**Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial oleh
Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota
Bandung**

Skripsi

Oleh

Parasian Manurung

2013310007

Pembimbing

Dr. Indraswari

Bandung

2018

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Parasian Manurung

Nomor pokok : 2013310007

Judul : Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Telah diuji dalam Ujian Sidang Jenjang Sarjana

Pada Selasa, 24 Juli 2018

Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua sidang merangkap anggota

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

Sekretaris

Dr. Indraswari

Anggota

Gina Ningsih Yuwono, Dra., M.Si

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Pius Sugeng Prasetyo

Pernyataan Penulis

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Parasian Manurung
NPM : 2013310007
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Program Pemberdayaan Komunitas
Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Dinas
Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
Kota Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya tulis ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Adapun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 12 Juli 2018



Parasian Manurung

Abstrak

Nama : Parasian Manurung

NPM : 2013310007

Judul : Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Judul penelitian ini adalah Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial (PSK) oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terhadap Pekerja Seks Komersial melalui pelatihan keterampilan dalam berbagai bidang dan juga memberikan pendampingan berupa konseling dan advokasi sosial juga modal untuk berwirausaha agar menjadi berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada para aktor yang terlibat dalam Program Pemberdayaan terhadap Pekerja Seks Komersial.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berhasil khususnya dilihat dari implementasi program. Ditunjukkan dengan terlaksananya perencanaan program pemberdayaan dengan melibatkan berbagai aktor, pematangan perencanaan program pemberdayaan ketika hendak diimplementasikan, pelaksanaan pemberdayaan dengan menggunakan 4 program utama pemberdayaan, dan mempertahankan momentum keberhasilan program dengan melakukan evaluasi dan pemantauan lanjutan terhadap Pekerja Seks Komersial yang telah berhasil memiliki keterampilan untuk berwirausaha.

Saran dari penelitian ini adalah Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung hendaknya lebih memperluas mitra kerja/partner dari berbagai sektor untuk merencanakan program pemberdayaan, membuat program terbaru sesuai dengan trend masyarakat saat ini, dan melakukan evaluasi keberhasilan dari program yang sebelumnya dilaksanakan dari tahun ke tahun.

Abstract

Name : *Parasian Manurung*

Student's ID : *2013310007*

Title : *Empowerment Program of Commercial Sex Workers (CSW) by Department of Social Affairs and Poverty Alleviation City of Bandung*

The title of this research is the Empowerment Program of Commercial Sex Workers (CSW) by the Department of Social Affairs and Poverty Alleviation City of Bandung. This study aims to determine the empowerment program undertaken by the Department of Social Affairs and Poverty Alleviation City of Bandung to Commercial Sex Workers through skills training in various fields and also provide assistance in the form of social counseling and advocacy as well as fund for entrepreneurship to be empowered and able to meet the needs of their life.

This study uses a qualitative method. Data collection techniques by interviewing the actors involved in the Sex Worker Empowerment Program.

The conclusion of this research is that the Sex Worker Empowerment Program by the Department of Social Affairs and Poverty Alleviation Bandung succeeded in particular seen from the implementation of the program. It is demonstrated by the implementation of the empowerment program by involving various actors, the maturation of the empowerment program planning when it is to be implemented, the empowerment implementation by using four main programs of empowerment, and maintaining the success of the program by conducting further evaluation and monitoring of the Commercial Sex Workers who have successfully skilled entrepreneurship.

Suggestions from this study are the Department of Social Affairs and Poverty Alleviation City of Bandung should further expand the partners from various sectors to plan empowerment programs, create the latest programs in accordance with the current trend of society, and evaluate the success of the program previously implemented from year to year.

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat dan kasih karunia serta perlindungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Program Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung”. Penulisan skripsi ini ditujukan untuk memenuhi syarat sidang skripsi serta untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (SAP) di semester yang akan datang pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan.

Pada kesempatan ini, peneliti juga ingin mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada semua pihak, terutama dan khususnya kepada :

1. Orangtua tercinta dan terkasih Lamhot Manurung M.Mar.Eng dan Nonce Marice Sindim yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk memperoleh hasil yang maksimal dan memuaskan
2. Adik-Adik tercinta Risna Manurung Amd.Keb dan Ludia Manurung yang juga ikut mendukung dan mendoakan
3. Sahabat seperjuangan penulis, Alfons Kristianto yang juga ikut mendukung, menyemangati serta mendoakan
4. Teman-teman Komunitas Fire Youth Community Gereja Katolik Paroki Santo Laurentius, Sukajadi, Bandung yang juga ikut mendukung dan mendoakan
5. Teman-teman Kepanitiaan RENEWABLE 2018 “Light us home” yang juga ikut mendukung dan mendoakan
6. Ibu Dr. Indraswari selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu, mengarahkan, serta memberikan nasehat kepada peneliti dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai
7. Dr. Pius Sugeng Prasetyo., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Katolik Parahyangan

8. Tutik Rachmawati, S.IP., MA., Ph.D Selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik
9. Segenap Dosen Pengajar di Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan
10. Seluruh Keluarga Besar Ilmu Administrasi Publik Universitas Katolik Parahyangan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Identifikasi Masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian	8
1.5 Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	10
2.1 Administrasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.....	10
2.2 Definisi Pemberdayaan	13
2.2.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	15
2.2.2 Indikator Pemberdayaan Masyarakat	17
2.2.3 Bina Manusia	20
2.3 Pengertian Prostitusi dan Pekerja Seks Komersial.....	21
2.4 Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat	24
2.4.1 Build Support.....	24
2.4.2 Make A Plan	26
2.4.3 Implement and Adjust The Plan	28
2.4.4 Maintaining Momentum	29

2.5 Model Penelitian	34
2.6 Operasionalisasi Variabel.....	35
2.6.1 Build Support.....	35
2.6.2 Make A Plan	36
2.6.3 Implement and Adjust The Plan	36
2.6.4 Maintaining Momentum	37
BAB III.....	39
METODE PENELITIAN	39
3.1 Tipe Penelitian	39
3.2 Jenis Penelitian.....	42
3.3 Lokasi Penelitian.....	42
3.4 Sumber Data.....	42
3.5 Prosedur Pengumpulan Data	44
3.6 Analisis Data	46
3.7 Pengecekan Keabsahan Temuan	47
BAB IV	50
PROFIL DINSOSNANGKIS KOTA BANDUNG	50
4.1 Tujuan dan Sasaran	50
4.2 Visi Misi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.....	52
4.2.1 Visi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung....	52
4.2.2 Misi Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung ...	54
4.3 Laporan Kegiatan Dinsosnangkis Kota Bandung	56
4.4 Struktur Organisasi Dinsosnangkis Kota Bandung.....	60
BAB V.....	61
ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	61
5.1 Pemberdayaan Pekerja Seks Komersial	62

5.1.1 Build Support.....	62
5.1.2 Make A Plan	73
5.1.3 Implement and Adjust The Plan	102
5.1.4 Maintaining Momentum	117
BAB VI.....	124
PENUTUP.....	124
6.1 Kesimpulan	124
6.2 Saran.....	127
DAFTAR PUSTAKA	131
LAMPIRAN.....	135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Administrasi Publik dan Pemberdayaan Masyarakat.....	12
Gambar 2.2 Pemberdayaan Masyarakat Flo Frank dan Anne Smith.....	24
Gambar 2.3 Community Planning Participants.....	26
Gambar 2.4 Seven Steps Community Planning Participants	27
Gambar 2.5 Model Penelitian	34
Gambar 4.1 Laporan Kegiatan Dinsosnangkis.....	56
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinsosnangkis	60
Gambar 5.1 Ilustrasi Mitra Kerja Dinsosnangkis.....	104
Gambar 5.2 Ilustrasi Perencanaan Program Pemberdayaan Dinsosnangkis	107

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Panduan Wawancara

Lampiran 2 : UU No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Lampiran 3 : Peraturan Daerah Kota Bandung No 24 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Penanganan Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung

Lampiran 4 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan

DAFTAR SINGKATAN

Dinkes : Dinas Kesehatan

Dinsosnangkis : Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan

Disnaker : Dinas Ketenagakerjaan

IMS : Infeksi Menular Seksual

LKIP : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

LPA : Lembaga Perlindungan Anak

NGO : Non Government Organization

Ormas : Organisasi Masyarakat

PMKS : Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

PSK : Pekerja Seks Komersial

Puskesmas : Pusat Kesejahteraan Sosial

Renja : Rencana Kerja

RKPD : Rencana Kerja Pembangunan Daerah

UU : Undang-Undang

WTS : Wanita Tuna Susila

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prostitusi merupakan suatu istilah yang sudah tidak asing lagi untuk didengar, karena kata-kata tersebut sudah ada sejak lama dan kerap kali menjadi bahan perbincangan bagi setiap orang. Prostitusi sudah dikenal di seluruh dunia, hampir setiap negara di dunia pasti memiliki dunia prostitusinya masing-masing, begitu juga dengan negara Indonesia. Prostitusi di Indonesia sendiri juga sudah lama berkembang sejak jaman penjajahan Jepang dan Belanda, bahkan pada saat itu prostitusi sudah menjadi marak di tengah masyarakat.

Perkembangannya sendiripun begitu cepat di Indonesia, hampir di setiap daerah di Indonesia bergelut dengan kasus prostitusi ini dan pasti daerah-daerah tersebut memiliki kebudayaannya masing-masing, sehingga menanggapi masalah prostitusi dengan caranya masing-masing. Dikarenakan hal tersebut cepat berkembang ke seluruh penjuru di Indonesia, prostitusi menjadi permasalahan sosial di setiap daerah. Walaupun memang ada yang menganggap ini masalah, tetapi hingga saat ini prostitusi belum dapat diatasi dan diselesaikan.

Bandung adalah salah satu kota terbesar dan terpadat penduduk di Indonesia dan kota ini menjadi ibukota dari Provinsi Jawa Barat, dimana tempat ini menjadi pusat pemerintahan, perekonomian, pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta fasilitas serta sarana dan prasarana publik bagi penduduk di

kota tersebut. Dengan semakin padatnya penduduk di Kota Bandung membuat situasi dan keadaan sosial cepat berubah, mulai dari pola kehidupan, status sosial, tingkat kesejahteraan hidup, dan berbagai aspek lainnya. Dengan glamoritas yang dimiliki oleh masyarakat Kota Bandung, ternyata ada kehidupan ‘terselubung’ dibalik itu semua, salah satunya ialah prostitusi.

Dikarenakan tidak adanya program efektif dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi permasalahan tersebut, prostitusi menjadi sebuah fenomena yang terus maju dan berkembang tanpa batasan ruang dan waktu. Hal itu dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya jumlah wanita pekerja seks komersial dari tahun ke tahun. Praktik prostitusi yang dilakukan secara terang-terangan hingga praktik prostitusi terselubung (online) sudah terjadi di berbagai tempat dan daerah di Indonesia.¹

Beberapa wanita pekerja seks komersial menikmati perannya sebagai seorang pekerja seks komersial. Hal ini dikarenakan anggapan dari mereka yang mengatakan bahwa pekerjaan ini cukup menjanjikan, uang dapat diperoleh dengan cara praktis, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi. Namun sebenarnya, wanita pekerja seks komersial mengalami konflik dalam dirinya (sisi psikis) dikarenakan adanya konflik internal (hati) yaitu antara membutuhkan uang dan perasaan berdosa, atau juga karena adanya perasaan tidak aman akan statusnya sebagai pekerja seks komersial dalam masyarakat².

¹ Organisasi Perburuhan Internasional. *Perdagangan anak untuk tujuan pelacuran*. YKAI : Jakarta. 2004. Halaman 22

² Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2005. Halaman 266

Banyaknya resiko yang harus dihadapi oleh mereka membuat mereka sebenarnya semakin berkonflik dengan diri sendiri. Resiko fisik, seksual, maupun sosial. Resiko fisik dan resiko seksual yang dihadapi antara lain berhubungan dengan resiko penularan penyakit infeksi menular seksual (IMS) dan resiko kehamilan. Dan tidak tanggung-tanggung juga, seringkali wanita-wanita yang berprofesi sebagai PSK tersebut mendapat perlakuan kasar dan tidak adil dari konsumennya, seperti disiksa, dipukul, ditampar atau bahkan tidak dibayar apabila tidak bisa memuaskan hasrat seksual konsumennya.

Resiko sosial berasal dari masyarakat ialah eksistensi profesi dari dirinya yang tidak dapat diterima sebagian kalangan masyarakat. Wanita pekerja seks komersial dipandang sebagai makhluk yang menyanggah stereotip negatif dan dianggap tidak layak menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehingga harus diasingkan atau dikucilkan. Sehingga mereka (PSK) merasa khawatir apabila statusnya diketahui masyarakat. Kebanyakan dari mereka tidak ingin masyarakat mengetahui profesi mereka agar hal itu tidak terjadi.³

Data dari Kantor Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat (2003) mengidentifikasi tempat-tempat pelacuran terbuka dan mencatat adanya 6.276 pekerja seks, sekitar 30% diantaranya diperkirakan berusia 18 Tahun, atau sekitar 1.800 anak-anak yang dilacurkan. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat memperkirakan paling tidak ada 22.830 pekerja seks komersial dewasa dan 9.000 anak dibawah umur di Jawa Barat. Menurut Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Barat mencatat bahwa 43, 5% korban trafficking yang dijadikan pekerja seks dijual pada umur paling

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial*. Raja Grafindo Persada : Jakarta. 2005. Halaman 267

muda 14 Tahun (empat belas tahun) dan umur paling rawan adalah anak yang berumur 17 Tahun (tujuh belas tahun).⁴

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung juga memiliki data terkait dengan jumlah kelompok wanita tuna susila (WTS). Pada tahun 2010, tercatat sebanyak 511 orang wanita terlibat dalam kasus prostitusi di setiap lokasi dimana adanya prostitusi di Kota Bandung. Pada tahun 2012, tercatat sebanyak 319 orang wanita terlibat dalam kasus prostitusi. Sehingga dapat diketahui dari data yang sudah disebutkan diatas, bahwasanya permasalahan mengenai prostitusi masih menjadi PR besar pemerintah dan sampai saat ini belum ditemukan solusi terbaik untuk mengentaskan kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.⁵

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, pada pasal 1 butir 10, bahwasanya Pemberdayaan Sosial ialah segala upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada pasal 12, ayat 1 a dan b, bahwa Pemberdayaan Sosial dimaksudkan untuk :

- a. Memberdayakan seseorang, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri.
- b. Meningkatkan peran serta lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

⁴ LKIP Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung. 2014. Bandung. Halaman 7

⁵ *Ibid.* Halaman 7

Kemudian, pada ayat 2 dibahas juga bahwa Pemberdayaan Sosial dilakukan melalui:

- a. Peningkatan kemauan dan kemampuan
- b. Penggalian potensi dan sumber daya
- c. Penggalian nilai-nilai dasar
- d. Pemberian akses dan/atau
- e. Pemberian bantuan usaha

Kemudian, pada ayat 3 dibahas secara spesifik lagi mengenai bentuk pemberdayaan yang dilakukan dengan cara:

- a. Diagnosis dan pemberian
- b. Pelatihan keterampilan
- c. Pendampingan
- d. Pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha
- e. Peningkatan akses pemasaran hasil usaha
- f. Supervisi dan advokasi sosial
- g. Penguatan keserasian sosial
- h. Penataan lingkungan dan/atau
- i. Bimbingan lanjut⁶

Akan tetapi dari kasus prostitusi yang sebelumnya, bahkan hingga saat ini permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan dengan efektif dan masih banyak kasus prostitusi yang masih marak terjadi di berbagai daerah, sekalipun

⁶ UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

penanganan sudah dilakukan tetapi hanya bersifat sementara dan untuk jangka waktu tertentu saja. Dan dikarenakan regulasi hukum dari hal tersebut masih sangat umum dan sanksi pidana dan sosial tidak tegas diberikan sehingga masih membuat fenomena prostitusi ini terus bergulir dan tidak pernah usai hingga saat ini.⁷

Maka dari itu, untuk memahami secara jelas dan konkrit mengenai bagaimana proses pelaksanaan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terhadap wanita Pekerja Seks Komersial (PSK), peneliti akan menggunakan Teori *Community Development* yang dikemukakan oleh Flo Frank & Anne Smith, yaitu :

1. *Build a Support*

Dimana disini berbagai usaha dan upaya pemberdayaan terhadap PSK melalui proses penyadaran kepada PSK lainnya merupakan hal pertama yang harus dilakukan, hal ini dilakukan agar menggunakan bantuan dan dorongan dari pihak lain agar masalah awal prostitusi dapat teridentifikasi antara lain praktik prostitusi langsung dan online, perdagangan anak ilegal, sanksi hukum pidana atau sosial yang lemah, dan stigma negatif masyarakat terhadap profesi tersebut oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

2. *Make a Plan*

⁷ Peraturan Daerah Kota Bandung No 24 Tahun 2012 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Kemudian membuat perencanaan mengenai apa saja kegiatan yang akan dilakukan dari awal hingga akhir untuk memperkuat atau mempertegas rencana pemberdayaan yang sudah ada atau yang hendak dibuat terhadap PSK oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

3. *Implement and Adjust Plan*

Tahap yang penting untuk mengimplementasikan semua perencanaan di awal sampai akhir secara sistematis dan berkelanjutan melalui program-program pemberdayaan yang sudah ada yang dianggap mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi PSK

4. *Maintaining Momentum*

Melalui program pemberdayaan yang sudah dilakukan diharapkan dapat dipertahankan atau dilanjutkan dan melakukan penyesuaian program yang ada agar dapat mengatasi fenomena tersebut dan sudah siap siaga apabila permasalahan mengenai prostitusi muncul lagi.⁸

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai pemberdayaan terhadap Pekerja Seks Komersial, maka peneliti menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam mengatasi masalah prostitusi ?

1.3 Identifikasi Masalah

⁸ Flo Frank, Anne Smith. 1999. *The Community Development Handbook: A Tool To Build Community Capacity*. Canada: Flo Frank and Anne Smith for Human Resources Development Canada. Halaman 5

- Bagaimana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung membangun dukungan untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap Pekerja Seks Komersial ?
- Bagaimana Dinas Sosial Kota Bandung dan Penanggulangan Kemiskinan membuat perencanaan untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap Pekerja Seks Komersial ?
- Bagaimana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mengimplementasikan perencanaan yang sudah dibuat untuk melaksanakan pemberdayaan terhadap Pekerja Seks Komersial ?
- Bagaimana Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung mempertahankan momentum yang sudah ada pada saat proses pemberdayaan telah dilakukan terhadap Pekerja Seks Komersial ?

1.4 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui dukungan yang diberikan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terhadap PSK
- Untuk mengetahui proses perencanaan yang dibuat oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terhadap PSK
- Untuk mengetahui implementasi perencanaan yang sudah dirancang oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung terhadap PSK
- Untuk mengetahui momentum program yang telah dijalankan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melalui pemberdayaan terhadap PSK

1.5 Kegunaan Penelitian

- Untuk mengetahui bagaimana langkah dan cara yang tepat dalam memberikan pemberdayaan bagi PSK
- Untuk menjadi masukan bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial agar lebih memperbaiki kinerjanya dan melaksanakan pemberdayaan dengan lebih baik lagi